

Dedi Aroza Lantik Dewan Pakar dan Dewan Penasihat PKS Kab. Bogor

BOGOR (IM)-Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza melantik Dewan Pakar dan Dewan Penasihat. Pelantikan ini dilaksanakan saat Acara Halal Bihalal pengurus dan kader PKS Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan itu, Dedi Aroza mengamanatkan kepada pengurus dan anggota PKS untuk memperkuat kesabaran menghadapi tahun politik yang penuh tantangan.

"Hambatan internal maupun eksternal akan bermunculan menjelang tahun politik. Ini harus disikapi dengan kesabaran yang tinggi oleh anggota dan pengurus PKS disemua tingkatan," ucap Dedi Aroza kepada wartawan, Senin (29/5).

Ia menuturkan bahwa dengan kesabaran yang kuat tidak mustahil apa yang dicita-citakan PKS Kabupaten Bogor akan terwujud, contohnya tentang target perolehan kursi 19 DPRD Kabupaten Bogor. "Segegap bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) telah siap menyambut tahun politik dengan seluruh tahapannya. Termasuk jika aturan proporsional tertutup maupun terbuka diberlakukan," tuturnya.

Sementara itu dengan dibentuknya Dewan Pakar dan Dewan Penasihat, Dedi menjelaskan, merupakan langkah upaya DPD PKS Kabupaten Bogor mem-

berikan kontribusi berupa masukan dan solusi bagi masyarakat Kabupaten Bogor, bagaimana PKS Kabupaten Bogor bisa bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bogor serta meluaskan dukungan masyarakat kepada PKS.

Adapun, yang dilantik sebagai Dewan Pakar PKS Kabupaten Bogor berjumlah 15 orang. Dengan Ketua Dewan Pakar, DR. Syamsuddin MPd, Kepakaran Pendidikan dan Jaringan dan Sekretaris Dewan Pakar, Eman Sulaiman SSos MPd, Kepakaran Pendidikan dan Jaringan Lembaga.

Sedangkan Dewan Penasihat PKS Kabupaten Bogor yang dilantik, berjumlah 5 orang, dengan Ketua Dewan Penasihat, Drs. H. Dja'far Aziz dan Sekretaris Dewan Penasihat, Subardi. Musthafa Sunhaji Ketua Bidang Pembinaan Umat DPD PKS Kabupaten Bogor sebagai ketua pelaksana kegiatan halal bihalal mengatakan kegiatan pelantikan ini merupakan penutup dari sejumlah kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri 1444 Hijriyah. •gio

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

SOSIALISASI GERAKAN SADAR PANGAN

Pelajar menunjukkan bekal makanan sehat saat kegiatan gerakan makan benar di Saparua, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/5). Gerakan tersebut sebagai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memulai mengonsumsi makanan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) sebagai salah satu program pemerintah dalam mengatasi stunting.

Ridwan Kamil: Jalan Khusus Tambang di Kab. Bogor Satu-satunya di Indonesia

Kendala pembangunan jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor sepanjang 11,5 km itu terkait regulasi hingga terus mundur pelaksanaannya. "Kalau regulasinya ada di Pemprov Jawa Barat, tentunya sudah selesai sejak lama. Tapi izin pembangunan jalan ini ada di pemerintah pusat, sehingga selesainya lama, kata Ridwan Kamil.

CIGUDEG (IM)- Gubernur Jabar, Ridwan Kamil meninjau lokasi pembangunan jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor. Tepatnya, di Desa Rengasajar, Cigudeg. Saat ke lokasi jalan khusus

tambang di Kabupaten Bogor itu, Ridwan Kamil hadir bersama rombongan jajaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Energi Sumber Daya Manusia, dan PT Jasa Sarana.

Ridwan Kamil mengatakan, jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor itu merupakan inovasi dan baru ada satu di Indonesia, hingga Menteri ESDM Ignasius Jonan mengeluarkan peraturan menteri (Permen) Khusus.

"Jalan khusus kendaraan truk tambang ini inovatif, tidak sederhana kata-kata hingga Menteri ESDM mengeluarkan atau menerbitkan Permen khusus terkait jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor ini," kata Ridwan Kamil kepada wartawan, Senin (29/5).

Pria yang akrab disapa Emil itu pun menerangkan kendala pembangunan jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor sepanjang 11,5

km itu terkait regulasi hingga terus mundur pelaksanaannya.

"Kalau regulasinya ada di Pemprov Jawa Barat, tentunya sudah selesai sejak lama jalan khusus tambang ini. Izin pembangunan jalan ini ada di pemerintah pusat," terangnya.

Pembangunan jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor itu merupakan kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana dengan PT Amal Arjuna Jayabaya.

"Pembangunan dan pengelolaan jalan khusus tambang ini akan ditangani oleh PT Jasa Sarana dan PT Amal Arjuna Jayabaya, lalu juga ada peran konsorsium pengusaha tambang dan juga Pemkab Bogor," jelas Emil.

Dia melanjutkan, pembangunan jalan khusus tambang ini akan selesai ketika ia tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, di mana masa baktinya habis pada September tahun ini.

"Memang janji itu tidak mudah, apalagi kita harus memenuhi aturan," lanjutnya.

Sementara itu, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan warga Kabupaten Bogor khususnya masyarakat sekitar mendukung rencana pembangunan jalan khusus tambang tersebut.

"Pak Gubernur Jabar, apa yang kita cita-citakan yaitu pembangunan jalan khusus tambang ini tentunya kami dukung penuh dan semoga ini bisa tercapai di akhir masa jabatan," ujar Iwan. •gio

Belum Ada Sekolah Inklusi Tingkat SMA di Kota Tangerang

TANGERANG (IM)-Sekolah inklusi tingkat SMA di Kota Tangerang belum ada. Ini menjadi sorotan Ketua Ketua Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas Republik Indonesia Periode 2022-2026, Dr Dante Rogmalia.

Dante pun mengaku jika pihaknya hingga saat ini masih berkomunikasi dengan Pemprov Banten untuk merealisasikan hal tersebut. Ketua Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas Republik Indonesia Periode 2022-2026, Dr Dante Rogmalia mengatakan, pihaknya berharap semua sekolah tingkat SMA di Banten dapat menerima anak-anak disabilitas.

"Dari Komnas Disabilitas mengharapkan jangan ada label sekolah inklusi. Kalau ada sekolah inklusi, maka sekolah lain tidak inklusi. Dan filosofinya, sekolah inklusi itu adalah semua sekolah harus menerima semua anak termasuk disabilitas," ujarnya, kemarin.

Dante mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan komunikasi dengan DPRD Banten mengenai hak anak disabilitas di Banten. "Kami baru bertemu sekitar dua kali dengan Ketua DPRD menyampaikan

tentang sosialisasi Komnas Disabilitas meningkatkan mutu pendidikan. Kami akan berdiskusi lagi dengan Pemprov Banten secara spesifik mengenai strategi pendidikan agar dapat disediakan bagi setiap anak khususnya disabilitas," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang, Anief R Wismaniyah mengatakan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Pemprov Banten terkait pendirian sekolah inklusi tingkat SMA. Di mana, nantinya, sekolah SMA yang berlokasi di Kota Tangerang dapat dijadikan sekolah inklusi.

"Kita sudah mengimbau kepada Provinsi Banten untuk bisa menjadikan sekolah SMA yang ada di Kota Tangerang menjadi sekolah inklusi," ujarnya beberapa waktu lalu.

Anief mengatakan, pihaknya juga mendorong Pemprov Banten membuat Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Tangerang. "Kemarin juga sudah saya bicarakan dengan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur sudah mempertimbangkan. Mudah-mudahan teralisasi paling lambat tahun depan," tambahnya. •pp



IDN/ANTARA

GELAR PANGAN MURAH DI BANDUNG

Warga mengantri untuk membeli bahan pokok saat gelar pangan murah di Saparua, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/5). Acara tersebut bertujuan sebagai stabilisasi harga pangan serta memudahkan warga untuk memenuhi pasokan pangan sehingga mampu menekan inflasi di Kota Bandung.

Menag: Tahun Depan Bandara Kertajati Bisa Dimanfaatkan Jemaah Haji Jateng

MAJALENGKA (IM)-Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholli Qoumas mengatakan pada 2023 Bandara Kertajati diprioritaskan melayani masyarakat Jawa Barat bagian utara. Sedangkan tahun depan diharapkan bisa melayani jemaah calon haji dari Jawa Tengah bagian barat serta selatan.

"Tahun ini diprioritaskan untuk Jabar bagian utara, tapi nanti tahun depan bisa diskenaiokan untuk Jateng bagian barat dan selatan," kata Yaqut di Majalengka, Minggu (28/5) malam.

Menurut dia, letak Bandara Kertajati memang lebih dekat dengan daerah Jawa Tengah bagian barat dan selatan, sehingga nantinya diharapkan dapat menampung jemaah calon haji dari daerah tersebut.

Dia menjelaskan jemaah calon haji dari Jateng bagian barat dan selatan terlalu jauh ketika harus berangkat dari Embarkasi Solo sehingga diharapkan skenarionya nanti bisa jalan, supaya Bandara Kertajati tidak hanya melayani warga Jawa Barat bagian utara. "Bandara Kertajati ini bisa dimanfaatkan oleh warga

lainnya, bukan hanya dari Jawa Barat bagian utara, namun bisa juga masyarakat Jawa Tengah," tutur Yaqut.

Yaqut juga memastikan penerbangan umrah dari Bandara Kertajati sudah dimulai dan itu dilakukan rutin dengan harapan ke depan bandara tersebut bisa lebih hidup lagi.

Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ace Hasan Syadzily menyambut baik dengan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Provinsi Jawa Barat yang dapat memberikan pelayanan secara optimal terhadap para calon haji.

Apalagi, tahun ini Bandara Kertajati sudah bisa dimanfaatkan untuk mengangkut jemaah calon haji sehingga yang selama ini calon haji dari Jawa Barat bagian utara harus ke Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, namun saat ini sudah lebih dekat. "Kami tentu menyambut baik langkah Kementerian Agama dan Pemprov Jabar atas dilaksanakannya keberangkatan calon haji dari Bandara Kertajati," kata Ace, dikutip Antara. •pra

DPRD Minta Pemkot Bogor Seriusi Penataan PKL

BOGOR (IM)- Komisi II DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, meminta pemerintah kota (pemkot) seriusi penataan pedagang kaki lima (PKL). DPRD menekankan koordinasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bogor, serta pola penataan PKL.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan, mengatakan, selama ini perangkat daerah yang terkait penanganan PKL masih minim koordinasi. "Komisi II meminta agar SKPD (perangkat daerah) mengubah cara pandang terhadap PKL," kata dia, kemarin.

Menurut Anita, perubahan cara pandang dan pola penataan itu merespons juga aspirasi yang disampaikan Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL). Ia menekankan pentingnya komunikasi yang dibangun antara tim pemerintah dengan pihak PKL, juga dengan DPRD Kota Bogor.

Anita mengatakan, DPRD juga meminta Pemkot Bogor melakukan sensus atau menda PKL secara keseluruhan. "Hal ini nantinya akan menjadi landasan dalam mengambil kebijakan, agar kita bisa memprioritaskan para pedagang yang merupakan asli warga Kota Bogor. Sebab, data sementara menunjukkan hanya 34 persen saja warga Kota Bogor yang

menjadi PKL," kata Anita.

Menurut Anita, Komisi II DPRD juga menyampaikan agar Pemkot Bogor memprioritaskan anggaran untuk penataan, dengan harapan tercapai pelaksanaan penertiban, yang sesuai dengan asas kemanusiaan yang berlandaskan peraturan. "Ini agar memenuhi harapan semua pihak, yang tentunya tidak melanggar hukum, sehingga semua akan merasa aman dan nyaman berkelanjutan," ujarnya.

Sebelum melakukan penertiban atau penataan PKL, Anita mengatakan, Pemkot Bogor diminta terlebih dahulu menyiapkan lokasi yang tepat, yang menguntungkan bagi semua pihak. Menurut dia, pemkot juga diminta menyiapkan pendamping dalam upaya penataan PKL agar dipastikan berjalan sesuai aturan.

"Terakhir dan yang terpenting, dibutuhkan komitmen yang tegas dan konsisten dari pemerintah untuk melakukan penataan PKL agar tidak timbul lagi masalah-masalah baru," kata Anita.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Jatirin, menyoroti soal pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

Menurut Jatirin, PKL yang ada di Kota Bogor bisa dikategorikan usaha mikro jika melihat pada keuntungan yang didapatkan.

Jatirin meminta Pemkot Bogor untuk menerbitkan peraturan wali kota (perwal) yang menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan perda tersebut.

"Karena kalau kita lihat ini jauh api dari panggung terkait pelaksanaan perda. Maka perlu adanya perwal yang menjadi petunjuk teknis bagi dinas dalam pelaksanaan perda di lapangan nantinya, agar penataan sesuai dengan keinginan pemkot dan harapan PKL," kata Jatirin.

Berdasarkan data yang disampaikan jajaran Pemkot Bogor dalam rapat, Jatirin mengatakan, dari sekitar 51 titik lokasi PKL di Kota Bogor, penataan baru dilakukan di 14 titik. Ia meminta pemkot menyiapkan skenario yang tepat dalam menata PKL ke depannya.

"Kami menekankan, setiap akan melakukan penataan kawasan, hendaknya dilakukan dialog dengan para pelaku usaha mikro atau PKL. Komisi II meminta Pemkot Bogor melakukan penataan PKL dengan membuka selter atau zona PKL dengan melakukan pendampingan terhadap mereka," ujar Jatirin. •pur



SISWA KUNJUNGI SITUS CAGAR BUDAYA

Siswa sekolah menengah pertama (SMP) melihat struktur batu situs budaya Pandegong, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (29/5). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran literasi dalam pengenalan sejarah serta menumbuhkan kepedulian siswa terhadap cagar budaya.

Pakan Masih Impor, Penyebab Harga Telur Ayam Mahal

SOREANG (IM)- Masih impornya sebagian bahan baku pakan ternak, menyebabkan mahalnya harga telur ayam pada saat ini. Di sisi lain, para peternak ayam baru terus bermunculan, menyebabkan semakin besar kebutuhan pakan di dalam negeri.

"Ada beberapa komponen yang memang tidak bisa disediakan di dalam negeri. Seperti tepung tulang dan tepung daging itu harus didatangkan dari Brazil dan Thailand oleh produsen dalam negeri," kata Saeful Bahri salah seorang peternak ayam petelur di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Senin (29/5).

Dikatakan Saeful, tingginya harga pakan ini tentu sangat memberatkan para peternak ayam petelur seperti dirinya. Jika dalam kondisi normal pakan ayam petelur perkarung isi 50 kilogram seharga Rp 365 ribu, saat ini menjadi Rp 395 ribu.

Akibatnya, biaya produksi tak lagi sebanding dengan harga jual telur.

Celakanya, dalam hal ini pemerintah tidak bisa melakukan campur tangan, karena memang perdagangan semuanya diserahkan kepada pasar.

"Kalau pabrik pakan kita ada di sini, seperti ada yang di Subang dan Cirebon. Namun sayangnya, perdagangan ini tidak bisa diatur oleh pemerintah seperti beras oleh Bulog. Yah ini bisa dilakukan permainan para kartel pemodal asing, dan ini sudah berlangsung puluhan tahun lalu," ujarnya.

Saeful melanjutkan, kondisi saat ini, memang terasa mengerikan. Biasanya, harga telur turun atau paling tidak stabil pasca hari raya Idul Fitri. Namun saat ini justru naik dan seolah tak terkendali. Ia menduga, kenaikan harga pakan ini juga dipicu semakin banyaknya orang yang mencoba peruntungan dengan beternak ayam petelur. Akibatnya, kebutuhan pakan terus meningkat, sedangkan supply dari produsen pakan masih tetap. •pur

Pemda KBB Hanya Mampu Perbaiki Jalan Rusak Sepanjang 1,6 Kilometer

NGAMPRAH (IM)- Kondisi jalan rusak sepanjang 4 kilometer yang berada di wilayah Batujajar, Pangauban dan Girimukti, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini mulai diperbaiki. Pasalnya, kondisi jalan rusak tersebut kerap dikeluhkan masyarakat KBB. Terlebih, mengingat akses jalan di Batujajar tersebut merupakan penunjang perekonomian warga.

"Panjang keseluruhan jalan di kawasan Batujajar tersebut mencapai 7,3 kilometer. Namun, dari total panjang tersebut jalan rusak hanya sepanjang 4 kilometer," kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUR) KBB, Aan Sopian kepada wartawan.

Kendati demikian, jelas Aan, untuk sementara pihaknya bakal melakukan perbaikan jalan sekitar 1,6 kilometer mengingat anggaran yang tersedia terbatas.

"Untuk penanganan sekarang anggaran yang dialokasikan

hanya Rp4 miliar," jelasnya.

"Anggaran tersebut baru bisa menangani jalan rusak di Batujajar, Pangauban dan Girimukti sepanjang 1,6 kilometer yang dilakukan dengan pembebasan," sambungannya.

Berdasarkan perencanaan awal, terang Aan, perbaikan jalan rusak di wilayah tersebut dilakukan di empat titik. Terutama, di titik yang mengalami kerusakan parah. "Kebetulan di perencanaan awalnya hanya ada empat titik. Untuk titik pertama di STA 2.000 sampai 2.400 meter, kedua 3.000 sampai 3.200 meter," terangnya.

"Kemudian, di titik ketiga STA 3.700 sampai 4.200 meter dan terakhir STA empat 4.300-4.800 meter. Total 1,6 kilo. 4 titik dalam satu ruas," sambungannya.

Lebih lanjut Aan menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan sosialisasi di Desa Pangauban terkait adanya perbaikan jalan tersebut. •pra